



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024;
12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG RENCANA AKSI PERCEPATAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja bertujuan untuk:
1. Media untuk membangun komitmen dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja organisasi;

2. Arah kebijakan dan strategi bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja serta sebagai dasar kolaborasi pelaksanaan kegiatan dan sinergi dengan pemangku kepentingan;
3. Sarana untuk monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja.

KETIGA : Seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

KEEMPAT : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Unit utama bertanggung jawab atas seluruh pelaporan capaian rencana aksi baik tingkat pusat maupun kantor wilayah;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh satuan kerja menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 10 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KELIMA : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan sanksi administratif dalam hal:

1. Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja;
2. Kepala Satuan Kerja yang telah melaksanakan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tetapi tidak memenuhi target kinerja yang telah ditentukan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Januari 2024

RENCANA AKSI BIDANG ADMINISTRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
SEKRETARIAT JENDERAL					
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Januari - Februari	Pendampingan penyusunan LKjIP	1. LKjIP Kemenkumham Tahun 2023 2. LKjIP UKE 1 Tahun 2023 3. LKjIP Kantor Wilayah Tahun 2023 4. LKjIP UPT Tahun 2023	Biro Perencanaan APIP Unit Eselon I Kantor Wilayah
		Januari - Juli	Pengembangan Aplikasi E-Performance	Aplikasi E-Performance dapat digunakan	Pusdatin
		Maret - Agustus	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023	Biro Perencanaan Unit Eselon I
		Maret	Penilaian Mandiri atas SAKIP Kantor Wilayah dan UPT	Laporan Penilaian Mandiri Kantor Wilayah dan UPT	Biro Perencanaan
		April	Verifikasi atas Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah	Laporan Verifikasi atas Penilaian Mandiri SAKIP Kantor Wilayah	Biro Perencanaan

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus-Desember	Sosialisasi Aplikasi E-Performance dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Laporan Sosialisasi Aplikasi E-Performance dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Biro Perencanaan
2	Belum terintegrasinya sistem pengelolaan SDM di Kemenkumham dan BKN	Januari - Februari	Persiapan integrasi sistem pengelolaan SDM antara Kemenkumham dan BKN (Jan - Feb)	Laporan Persiapan integrasi sistem pengelolaan SDM antara Kemenkumham dan BKN	Biro SDM Pusdatin
		Maret - Juni	Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg (Maret-Juni)	Laporan Monev terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg	Biro SDM
		Maret - Juni	Tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg (Maret - Juni)	Laporan Tindaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi di Kemenkumham pada Simpeg	Biro SDM
3	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Januari-Februari	Pemutakhiran Data 2023 Indikator : (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan hasil pemutakhiran data 2023	Biro SDM Unit Eselon I Kanwil UPT

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Januari- Februari	2. Pemetaan Data 2025 (Data Kualifikasi Pendidikan, Data Kompetensi, Data Kinerja, Data Disiplin)	Laporan pemetaan data 2025	Biro SDM Unit Eselon I Kanwil UPT
		Januari- Februari	3. Sosialisasi pemenuhan / peningkatan indeks Profesionalitas ASN	Laporan Sosialisasi pemenuhan / peningkatan indeks Profesionalitas ASN	Biro SDM
		Januari	1. Review pelaksanaan penilaian kompetensi dan pelatihan 2024 (Jan)	1. Kalender kegiatan	BPSDM
		Februari - Desember	2. Pelaksanaan penilaian kompetensi dan pelatihan dengan target (Kompetensi 14.520 orang, Pelatihan 55.635 orang)	Surat Keputusan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan pelatihan	BPSDM
		Februari - Desember	Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penilaian kompetensi dan pelatihan	Laporan hasil pelaksanaan	BPSDM
		Januari - Desember	Implementasi Corporate University di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham minimal 25%	Laporan triwulan implementasi Corporate University di	Kantor Wilayah dan UPT

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			pegawai per triwulan (Januari s/d Desember)	lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham	
4	Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	Januari - Maret	1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023; 2. Pemberian Penghargaan Nilai IKPA Terbaik tingkat UKE1 dan Kantor Wilayah; 3. Langkah-Langkah Strategis Tahun 2024.	1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023; 2. Penghargaan Nilai IKPA Terbaik tingkat UKE1 dan Kantor Wilayah; 3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal mengenai Langkah-Langkah Strategis Tahun 2024	Biro Keuangan
		April - Juni	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan I TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Kantor Wilayah dan UPT
		Juli - September	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Semester I TA 2024;	Kantor Wilayah dan UPT

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024.	2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	
		Oktober - November	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024.	1. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Triwulan III TA 2024; 2. Surat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III TA 2024 kepada Kantor Wilayah.	Kantor Wilayah dan UPT
5	Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN	Juni - Juli	Kantor Wilayah melakukan pendampingan Pra Penyusunan RKBMN	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	Kantor Wilayah
		Juli - Agustus	Melaksanakan Kegiatan Pra Penyusunan (Penguatan) Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Laporan Kegiatan Pra Penyusunan RKBMN	Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa
6	Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan	Jan-Mei	Sosialisasi Penyusunan Laporan Wasdal Tingkat Wilayah	Laporan Sosialisasi Penyusunan Laporan Wasdal	Biro Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa
		Januari dan Juli	Menyusun Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Laporan Wasdal tingkat Wilayah Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024	Kantor Wilayah

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
7	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Juni	Pembuatan aplikasi sistem pengawasan pengendalian pengelolaan kearsipan	Aplikasi sistem pengawasan pengendalian pengelolaan kearsipan Dimungkinkan penambahan fitur aplikasi E-RB	Pusdatin dan Biro Umum
		Januari	Melaksanakan sosialisasi pengisian formulir audit sistem kearsipan internal	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengisian formulir audit sistem kearsipan internal	Biro Umum
		Januari	Membuat SK Tim Pengawasan	SK TIM Pengawasan arsip Kantor Wilayah	Kantor Wilayah
		Januari - Juni	Implementasi pengawasan kearsipan internal sesuai dengan LKE	Laporan implementasi pengawasan kearsipan internal	Kantor Wilayah
		Juli - Desember	Monitoring dan evaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	Laporan monev dan rekomendasi hasil pengawasan kearsipan internal	Kantor Wilayah dan Biro Umum
8	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham	Januari	1. Membuat Surat Pendataan Aplikasi Khusus pada UKE-1, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis 2. Membentuk Tim Verifikator Aplikasi Khusus	1. Surat Pendataan Aplikasi Khusus pada UKE-1, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis 2. SK Tim Verifikator Aplikasi Khusus	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Sekretariat Jenderal	
		Maret-Oktober	Verifikasi Aplikasi Khusus oleh Pusdatin terhadap aplikasi yang telah diverifikasi oleh UKE-1 melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang lulus verifikasi oleh UKE-1	
		November	Menyusun draf Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Draf Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis	Kepala Kantor Wilayah
		Maret-Juni	Melaksanakan rekomendasi hasil verifikasi dan uji kelaikan keamanan oleh Pusdatin	Dokumen perbaikan aplikasi	
		Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Badan Strategi	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Kebijakan Hukum dan HAM melalui aplikasi Simdatin		
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Strategi Kebijakan Hukum dan HAM	
		Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Inspektorat Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal	
		Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional	Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Pembinaan Hukum Nasional melalui aplikasi Simdatin	tugas dan fungsi Pembinaan Hukum Nasional	Sekretaris BPSDM Hukum dan HAM
		Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Febuari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Keimigrasian melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Keimigrasian	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Direktur Teknologi Informasi AHU
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Direktur Pengundangan, Penerjemahan dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Peraturan Perundang-Undangan melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Peraturan Perundang-Undangan	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Hak Asasi Manusia	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Hak Asasi Manusia	
		Februari-April	Melakukan pendataan Aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui aplikasi Simdatin	Dokumen data Aplikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
		Maret-Juni	Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Kekayaan Intelektual melalui aplikasi Simdatin	Screenshot Hasil Verifikasi Aplikasi Khusus yang memiliki fungsionalitas berkaitan dengan tugas dan fungsi Kekayaan Intelektual	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
INSPEKTORAT JENDERAL					
9	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham	Triwulan	Laporan Triwulanan evaluasi pelaksanaan dari Kanwil ke UKE I, UKE I ke Biro Perencanaan, Biro Perencanaan ke Itjen	Outcome : Capaian Program Prioritas Kementerian Hukum dan HAM tepat sasaran dan berdampak pada masyarakat Output / Data Dukung dari Itjen: Laporan APIP Hasil Evaluasi Capaian Prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Inspektorat Jenderal Sekretariat Jenderal Kantor Wilayah Unit Eselon I
		Triwulan	Evaluasi Triwulanan oleh Itjen		
		Triwulan	Penyampaian laporan di Minggu pertama setiap triwulan		
10	Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK	Sepanjang tahun	Glorifikasi peningkatan integritas dan budaya anti korupsi Satker yang diputar setiap hari (Berupa rekaman tentang budaya integritas)	Outcome : Meningkatnya Budaya Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang dibuktikan dengan perolehan Indeks SPI yang meningkat dari tahun sebelumnya (berdasarkan penilaian KPK) Output / Data Dukung dari Itjen:	Inspektorat Jenderal Seluruh UKE I Kantor Wilayah Seluruh UPT
		Triwulan I	Tindak lanjut hasil SPI 2023		
		Triwulan II	a.Penetapan responden eksternal dan internal yang tepat b. Sosialisasi kepada responden eksternal		

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Triwulan III	Pelaksanaan Survei oleh KPK	1. Matriks Tindak Lanjut hasil Penilaian Integritas (SPI-KPK) Tahun 2023 2. Laporan Pelaksanaan Penguatan/ Sosialisasi atas Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 3. Laporan KPK tentang hasil SPI Kemenkumham Tahun 2024	
		Triwulan III	Hasil survei		



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Januari 2024

RENCANA AKSI BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
DITJEN PP					
1	Belum terdapat Riwayat Pendokumentasian Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Menyusun JawabanTermohon di MA dan Keterangan presiden di MK	Januari	Menetapkan SK Tim Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	SK Tim Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan
		Februari	Melakukan Inventarisasi Target yang akan dicapai B04-B06	Inventarisasi Target yang akan dicapai B04-B06	
		Maret-April	Persiapan Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Draf Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	
		Mei-Desember	Penyusunan Buku Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Buku Sejarah Pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP	
2	Belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi E-Pengundangan dalam	Januari	Menetapkan SK Aplikasi e-pengundangan	SK Aplikasi e-pengundangan	Direktur Pengundangan,

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	pengajuan permohonan pengundangan peraturan perundang-undangan	Februari	Persiapan Sosialisasi Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui Aplikasi e-pengundangan	Laporan Persiapan Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui Aplikasi e-pengundangan	Penerjemahan, dan Publikasi
		Maret	Sosialisasi Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundangundangan melalui Aplikasi e-pengundangan	Laporan Sosialisasi Permenkumham tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan melalui Aplikasi e-pengundangan	
		April	Termanfaatkannya Aplikasi E- pengundangan oleh 10% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		Mei	Termanfaatkannya Aplikasi E- pengundangan oleh 20% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		Juni	Termanfaatkannya Aplikasi E- pengundangan oleh 30% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		Juli	Termanfaatkannya Aplikasi E- pengundangan oleh 40% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 50% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		September	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 60% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		Oktober	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 70% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		November	Termanfaatkannya Aplikasi E-pengundangan oleh 80% Kementerian/Lembaga	Data K/L yang telah memanfaatkan Aplikasi Epengundangan	
		Desember	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi E-Pengundangan dan Rencana Pembangunan Aplikasi Tahun 2025	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi E-Pengundangan	
3	Masih rendahnya peringkat pencarian Laman Resmi Ditjen PP yang berisi database Perundang-undangan (www.peraturan.go.id)	Januari	Menetapkan SK Tim Pencarian website peraturan.go.id di mesin pencari (google)	SK Tim Pencarian website peraturan.go.id di mesin pencari (google)	Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi
		Februari-Juni	Melakukan update Peraturan Perundang-undangan di website peraturan.go.id	Screenshot Ranking website	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Juli	Melakukan evaluasi Semester I Terhadap update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	Laporan Evaluasi update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	
		Agustus-November	Melakukan update Peraturan Perundang-undangan di website peraturan.go.id	Screenshot Ranking website	
		Desember	Melakukan evaluasi Semester II Terhadap update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	Laporan Evaluasi update Peraturan Perundangundangan di website peraturan.go.id	
4	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.	Januari	Menetapkan SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	SK Tim Pembagian Kelompok Kerja dalam proses Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan SK Pembagian Wilayah Kerja (Zonasi) Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Februari	Melakukan koordinasi kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan hasil koordinasi dengan melampirkan: a. dalam hal Kanwil menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi, data dukung berupa: undangan, daftar hadir, Notula, dan Dokumentasi: b. dalam hal Kanwil datang langsung ke Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/kabupaten/Kota, data dukung berupa: Surat tugas, notula dan dokumentasi	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Maret- November	Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, dan Rancangan Kepala Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (memasukkan semua berkas ke dalam aplikasi SIPPDH)	Laporan kegiatan yang melampirkan:a. dalam hal kegiatan Pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa:Raperda1) Surat Permohonan Pengharmonisasian;2) Penjelasan/Keterangan3) Raperda yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa4) SK Tim Pembentukan Tim Penyusun Raperda5) SK Pembentukan Propemperda beserta daftar lampiran Propemperda atau SK Keputusan bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperda.Raperkada1. Surat Permohonan Pengharmonisasian2. Penjelasan/Keterangan3. Raperkada yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekda dan Pemrakarsa4. SK Kepala Daerah	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Propemperkada beserta daftar lampiran Propemperkada atau SK Keputusan Kepala Daerah yang menyatakan pembentukan rancangan di luar Propemperkada.b. dalam hal kegiatan selain pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi, data dukung berupa Surat tugas/daftar hadir,notula dan dokumentasi	
		Desember	Penyusunan dan Penyampaian Laporan kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah	Laporan Kegiatan Pengharmonisasian Raperda yang berasal dari Pemerintah Daerah,Raperda yang berasal dari DPRD, dan Raperkada oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	

Ditjen HAM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Kementerian/Lembaga, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Pusat	Januari	1. Implementasi Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (BHAM) 2. Pembentukan Tim Penyusunan Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Pembentukan Tim Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Pembentukan Tim Pengembangan Aplikasi PRISMA		1. Direktorat Kerja Sama HAM 2. Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM 3. Direktorat Pelayanan Komunikasi HAM 4. Direktorat Sistem Teknologi dan Informasi HAM 5. Direktorat Instrumen HAM
		Februari	1. Rapat penyusunan draft Rancangan Peraturan Menkumham tentang tata kerja GTN dan GTD BHAM 2. Penyusunan Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Penyusunan SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Penyusunan Modul Pengembangan Aplikasi PRISMA	1. Draft Rancangan Peraturan Menkumham tentang tata kerja GTN BHAM dan GTD BHAM 2. Draft Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Draft SOP 4. Draft Modul	
		Maret	1. Rapat Penajaman Aksi Bisnis dan HAM 2. Uji Coba Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Reviu SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Uji Coba Modul Pengembangan Aplikasi PRISMA	1. Laporan Rapat Penajaman Aksi Bisnis dan HAM 2. Laporan Uji Coba Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Laporan Reviu 4. Laporan Uji Coba Modul	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April	1. Rapat Kesekretariatan Bisnis dan HAM 2. Pelaksanaan ToT Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA	1. Laporan Rapat Kesekretariatan Bisnis dan HAM 2. Laporan Pelaksanaan ToT Strategi terkait BHAM dan PRISMA 3. Laporan Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Laporan Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA.	
		Mei	1. Pelaksanaan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Pelaksanaan ToT Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan Pelaksanaan ToT Strategi terkait BHAM dan PRISMA 3. Laporan Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Laporan Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA.	
		Juni	1. Pelaksanaan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Pelaksanaan ToT Modul terkait BHAM dan PRISMA 3. Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan Pelaksanaan ToT Strategi terkait BHAM dan PRISMA 3. Laporan Pelaksanaan ToT SOP Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran BHAM 4. Laporan Pelaksanaan ToT Aplikasi PRISMA.	
		Juli	1. Pelaksanaan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Stranas BHAM K/L/D (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan Pendampingan (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus	1.a. Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan dan pelaporan Aksi Bisnis dan HAM 1. b. Pembentukan Tim Helpdesk BHAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Stranas BHAM K/L/D (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	1.a. Surat Koordinasi ke Kementerian/ Lembaga/Daerah tentang pelaksanaan dan pelaporan Aksi Bisnis dan HAM 1. b. SK Tim Helpdesk BHAM 2. Laporan Pendampingan (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	
		September	1. Persiapan Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Implementasi Stranas BHAM K/L/D (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	1. Surat Koordinasi ke GTN BHAM terkait Persiapan Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2. Laporan Pendampingan (Diseminasi dan Penguatan, Pelayanan Komunikasi HAM dan Sistem Teknologi dan Informasi HAM)	
		Oktober	1. Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2.a. Penyusunan Tim Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM 2. b. Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM	1. Laporan Verifikasi Aksi Bisnis dan HAM 2.a. SK Tim 2. b. Laporan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM	
		November	1.a. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Bisnis dan HAM 1.b. Penyampaian Laporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM oleh Tim Helpdesk 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi BHAM	1.a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Bisnis dan HAM 1.b. Laporan Pelaksanaan 2. Laporan Pelaksanaan Monev	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Desember	1. Penyusunan Laporan Tahunan Aksi Bisnis Dan HAM Ke Presiden 2. Penyusunan Laporan Implementasi Stranas BHAM	1. Laporan Tahunan Aksi Bisnis Dan HAM Ke Presiden 2. Laporan Implementasi	
2	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Januari	Rapat Koordinasi terkait persiapan pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM	Laporan hasil koordinasi persiapan pembentukan GTD BHAM	Kadiv Yankum (Bidang HAM)
		Februari	Rapat penyusunan draft SK GTD BHAM	Draft SK GTD BHAM	
		Maret	Pengukuhan GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023	SK GTD BHAM sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023	
		April	Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	Laporan Rapat Kesekretariatan GTD BHAM	
		Mei	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	
		Juni	Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM	Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM	
		Juli	1.a. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1.a. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 1. b. Laporan pendampingan	
		Agustus	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan	
		September	1. Pelaksanaan Bimtek terkait Stranas Bisnis dan HAM 2. Pendampingan Pelaksanaan Uji Tuntas melalui Pengisian Aplikasi PRISMA	1. Laporan Bimtek Stranas Bisnis dan HAM 2. Laporan pendampingan 3. Laporan Pelaksanaan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			3. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM		
		Oktober	1. Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Monitoring Capaian Aksi dan Implementasi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		November	1. Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Stranas BHAM Daerah 2. Pelaksanaan Penanganan Pengaduan permasalahan BHAM	1. Laporan Evaluasi Capaian Aksi dan Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Pelaksanaan	
		Desember	1. Penyampaian Laporan Monev dan Tindak Lanjut Aksi serta Implementasi Pelaksanaan Bisnis dan HAM Daerah 2. Evaluasi penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	1. Laporan Monev dan Tindak Lanjut serta Implementasi Aksi Bisnis dan HAM Daerah 2. Laporan Evaluasi dugaan pelanggaran/permasalahan BHAM	
BPHN					
1	1. Belum adanya pengaturan teknis mengenai tata cara melakukan pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi di lingkungan	Maret	1. Membentuk Tim Kerja 2. Melaksanakan Rapat Penyusunan dan Pembahasan Awal	1. SK Pokja 2. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi 3. Daftar Inventarisasi Permasalahan	Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Pemerintah serta tindaklanjut hasilnya, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95B ayat (2) dan Pasal 97C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 2. Selain itu, belum adanya metode/tools dalam melakukan pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang	Juni	1. Menyusun Draft RPermen tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang- undangan 2. Melaksanakan Pembahasan RPermen dengan Narasumber	1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi. 2. Materi Narasumber 3. SK Narasumber 4. Draft RPermen	
		September	1. Rapat Pembahasan Draft Permen dengan Pemangku Kepentingan 2. Penyusunan Draft Peraturan Menteri dengan pengayaan materi berdasarkan hasil pembahasan dengan pemangku kepentingan	1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi 2. Draft RPermen hasil pembahasan dengan pemangku Kepentingan	
		November	Finalisasi Draft Rancangan Peraturan Menteri	1. Undangan, Absensi, Notula, Dokumentasi. 2. Rancangan Peraturan Menteri tentang Pedoman Analisis Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	
	1. Ketidaksiapan K/L untuk memenuhi syarat teknis pengajuan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2. Kurangnya kajian yang mendalam suatu RUU yang diajukan oleh K/L pemrakarsa	Maret	Menginventarisasi dan menyusun konsep awal Prolegnas Jangka Menengah 2025 - 2029	Konsep inventarisasi RUU dalam Prolegnas	Pusat Perencanaan Hukum Nasional
		Juni	Melaksanakan konsultasi publik dan lokakarya Prolegnas Jangka Menengah dalam rangka menjangkau aspirasi publik	Laporan hasil konsultasi publik dan lokakarya prolegnas serta rekomendasi hasil penjangkauan aspirasi publik	
		September	Melaksanakan koordinasi Prolegnas dengan Kementerian/ Lembaga dan/atau Baleg DPR sekaligus menyampaikan hasil konsultasi publik rancangan Prolegnas	Laporan hasil koordinasi dan tindak lanjut rekomendasi hasil penjangkauan aspirasi publik dengan K/L mengenai usulan RUU dalam Prolegnas Jangka Menengah	
		Desember	Menyampaikan Usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 di lingkungan pemerintah dari Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM	Surat Penyampaian Usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 di lingkungan pemerintah dari Kepala BPHN kepada Menteri Hukum dan HAM	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.	April	1. Inventarisasi data Kebutuhan PBH disetiap Kab/Kota 2. Penunjukkan Panitia dan Pokja, serta pengumuman pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum.	1. Data kebutuhan PBH disetiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh BPHN sesuai dengan hasil evaluasi atas persebaran PBH eksisting 2. SK Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi 2. SK Tim Pokja Pusat Verifikasi dan Akreditasi 3. Pengumuman Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi	Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
		September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Baru)	Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
		Desember	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Lama)	Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
	Masih sedikitnya Perguruan Tinggi yang mempunyai website jdih dan terintegrasi dengam portal website jdihn	Februari	Penjajakan Kerja Sama	Surat dari Badan Pembinaan Hukum Nasional terkait Permohonan Kerja Sama	Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
		Maret	Pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (<i>Brainstorming</i>)	Undangan, Absensi, Notula, dan Gambar/foto (UANG)	
		Juni	Rapat pembahasan draft dan kesepakatan para pihak	1. Undangan, Absensi, Notula, dan Gambar/foto (UANG) 2. Draft awal Perjanjian Kerja Sama	
		Agustus	Finalisasi materi Perjanjian Kerja Sama yang sudah disetujui kedua belah Pihak	1. Laporan hasil kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (TNDE) 2. Draft hasil kesepakatan Perjanjian Kerja Sama	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		November	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPHN dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	Perjanjian Kerja Sama antara BPHN dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi	
2	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb)	Maret	1. Rapat persiapan 2. Surat usulan penyampaian Desa/Kelurahan yang akan dijadikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan disetiap wilayah	1. Surat undangan rapat (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi) 2. Surat usulan Desa/Kelurahan Binaan dari masing-masing wilayah	KADIV YANKUM
		Juni	1. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Kadarkum di masing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 3. Implementasi kuesioner indeks desa/kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Akses informasi Hukum	1. SK Kelompok Kadarkum yang ditandatangani oleh Camat/Lurah/ Kepala Desa 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan kelompok Kadarkum masing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula, Gambar/Dokumentasi)	
		September	1. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah 2. Penyusunan SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 3. Implementasi kuesioner Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum dalam Dimensi Implementasi Hukum, Dimensi Akses Keadilan, Dimensi Akses Demokrasi	1. SK Desa/Kelurahan Binaan yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota 2. Laporan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dimasing-masing wilayah (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar/Dokumentasi)	
		Desember	Menyusun laporan capaian target Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Binaan dimasing-masing wilayah dan rencana usulan pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan tahun berikutnya	Laporan akhir capaian kinerja	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH. Berdasarkan Indeks Kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan PBH kepada Penerima Bantuan Hukum yang dihasilkan melalui wawancara kepada Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan nilai persepsi atas pelayanan bantuan hukum yang diterimanya, pada tahun 2023 baru dilakukan penilaian kinerja PBH sebanyak 506 PBH dari 619 PBH atau sebesar 81.7 %. Sehingga penilaian kinerja PBH atas kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan.	Juni	25% Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	KADIV YANKUM
		September	50% (B06: 25% + B09: 25%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
		Desember	85% (B09: 50% + B12: 35%) Pemberi Bantuan Hukum dilakukan Survey Layanan Bantuan Hukum terhadap Penerima Bantuan Hukum	1. Data penerima Bantuan Hukum yang dilakukan monitoring dan evaluasi dari aplikasi Sidbankum 2. Data PBH yang sudah dan belum di dilakukan monitoring dan evaluasi	
	Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH	Maret	Penunjukkan Pokjada Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	SK Tim Pokjada Verifikasi dan Akreditasi	KADIV YANKUM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.	Juni	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH baru)	Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
		September	Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)	Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
		Maret	Sosialisasi <i>Paralegal Justice Award</i>	Laporan Pelaksanaan sosialisasi	KADIV YANKUM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%. Di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan di bawahnya terjadi peningkatan signifikan akan volume perkara dari tahun ke tahun dan hal ini tidak diikuti dengan peningkatan jumlah Hakim dan ASN baik di daerah maupun di pusat. Hal ini berdampak pada peningkatan beban kerja Hakim dan ASN di lingkungan peradilan serta prosentase penyelesaian	Juni	Pelaksanaan seleksi <i>Paralegal Justice Award</i>	Usulan peserta <i>Paralegal Academy</i>	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	perkara di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, penting peran Kepala Desa/Lurah sebagai juru damai dalam penyelesaian konflik di desa/kelurahan atau berperan sebagai Paralegal. Peran kepala desa/lurah bukan saja memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal untuk menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, akan tetapi secara informal menjadi tokoh sentral yang dipatuhi oleh warganya, dan diharapkan menjadi pengayom yang dapat melindungi berbagai kepentingan desa dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan serta konflik yang terjadi. Kepala desa/lurah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa/kelurahan, memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dan strategis untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya, sehingga tercipta suasana yang harmoni, damai dan rukun di kalangan warganya. Hal ini juga sejalan dengan peran Kepala Desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat desa dan menyelesaikan perselisihan Masyarakat di desa.				

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Peran Lurah sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Lurah mempunyai tugas antara lain memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diberikan penguatan kompetensi terhadap Kepala Desa/Lurah yang telah berperan sebagai Paralegal untuk melaksanakan tugas menjaga ketentraman dan ketertiban serta lebih khususnya dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa agar dapat mengurangi perselisihan faham antara penduduk desa yang akan berujung pada proses hukum litigasi yang Panjang dan rumit melalui apresiasi Paralegal Justice Award.				

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Januari - Desember	Pengembangan sistem aplikasi Fidusia yang dapat melakukan filter atas obyek berserial number yang telah didaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga tidak terjadi Fidusia Ulang/Ganda	Pengembangan Aplikasi Fidusia yang dapat mengakomodir: 1. Fidusia Ganda; 2. History pendaftaran fidusia sampai dengan Roya; 3. Pop-Up notification kepada akun notaris	Ditjen AHU
		Maret - November	Penyebaran informasi terkait dengan kewajiban penghapusan jaminan fidusia yang telah selesai masa di wilayah	Laporan Penyebaran informasi terhadap terkait pendaftaran, perubahan penghapusan Jaminan Fidusia kepada masyarakat, notaris dan lembaga pembiayaan di wilayah	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Januari - Desember	Koordinasi dengan OJK selaku Pengawas lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan untuk data fidusia dan roya	Laporan hasil rapat koordinasi dengan OJK dan rekomendasi dari Ditjen AHU untuk OJK agar membuat kebijakan terhadap kewajiban penghapusan jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan	Ditjen AHU
2	Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Januari - Maret	Kantor Wilayah menghimpun data Notaris untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan database Ditjen AHU	Laporan Hasil Konfirmasi Data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Ditjen AHU dan Kadiv Yankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Januari - Mei	Penyusunan Kebijakan serta dokumen Proses Bisnis Migrasi dan Sinkronisasi Data	Dokumen Kebijakan dan Dokumen Proses Bisnis Migrasi dan Sinkronisasi Data	Ditjen AHU

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Mei - Desember	Implementasi Migrasi Data Notaris	Database notaris yang telah sinkron antara Data Ditjen AHU dengan data yang tersedia di Kanwil	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
DITJEN KI					
1	Belum adanya petunjuk atau peta jalan IG yang mengakibatkan rendahnya permohonan IG	Maret	Forum IG Nasional	Penandatanganan MOU, PKS dan Terbentuknya Gugus Tugas IG	Direktorat Merek Indikasi Geografis dan Dit KSE
		April	Rapat Kerja Tim Gugus Tugas IG	Draft Action Plan	Direktorat Merek Indikasi Geografis
		Mei	Rapat Kerja Tim Gugus Tugas IG	Draft Action Plan	
		Juni	Rapat Kerja Tim Gugus Tugas IG	Pengesahan Action Plan IG	
		Juli s.d November	Observasi Lapangan	peningkatan kompetensi Tim Gugus Tugas dalam memahami kondisi di Lapangan	
		Juli s.d Desember	penyusunan roadmap dengan melibatkan konsultan dan K/L terkait. penguatan peran serta akademisi atau universitas, komunitas atau masyarakat dan media	- draft roadmap dan finalisasi roadmap IG - pengesahan roadmap	
		Desember	evaluasi dan monitoring dan rencana tindak lanjut 2025	laporan hasil evaluasi dan monitoring	
	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografis	Maret	1. Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah 2. Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat 3. Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis	1. Laporan Koordinasi 2. Daftar inventarisasi produk IG 3. Daftar pihak-pihak terkait	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Agustus	1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah	1. Laporan Hasil Koordinasi 2. SK Pokja per wilayah 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG	
		September	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal 1 permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses	Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis	
		Desember	1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk	1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 2. Laporan Tindak Lanjut Pokja	
	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif	Februari - Juni	Diseminasi Merek Kolektif	pemahaman terkait merek kolektif	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Juli s.d Nov	Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek Kolektif 1 wilayah 1 merek kolektif	Laporan dan Bukti Permohonan 1 Merek Kolektif	
		Desember	Monitoring dan evaluasi	laporan monev terhadap tindak lanjut di Tahun 2025	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Persiapan kerja sama kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah-->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah	Triwulan 1-2	1) Persiapan penjajakan dengan mitra forum Gugus Tugas IG; 2) Pembentukan Gugus Tugas Indikasi Geografis sebagai forum koordinasi antara stakeholder lintas Kementerian/Lembaga/Pemda untuk mendorong pendaftaran IG dari wilayah	1. Tim Pusat: SK Bersama? SK Menkumham? 2. Tim Wilayah: SK Gubernur? SK Kakanwil?	- Direktur KSE - Pokja Kerja Sama Dalam Negeri - Pokja Layanan IG - Kakanwil
		Triwulan 1-3	1) Penyusunan Work Plan dari Gugus Tugas yang sudah terbentuk; 2) Sosialisasi dari poin Work Plan yang dibentuk (implementasi dari forum Gugus Tugas IG)	1) Dokumen Work Plan; 2) Laporan implementasi/sosialisasi	- Direktur MIG - Pokja Layanan IG
		Triwulan 4	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitorin dan Evaluasi	
	Indonesia IP Academy	Triwulan I	1) Pembentukan SK Menkumham tentang IP Academy; 2) Finalisasi Modul IP Academy	1) SK Menkumham tentang Pembentukan IP Academy; 2) Draft Final Modul IP Academy	Dit KSE
		Triwulan II	1) Pelatihan Calon Pengajar atau Training of Trainers (ToT) Modul 3 dan 4; 2) Kegiatan Pelatihan Percontohan (<i>Pilot Training</i>) dengan pengawasan dari WIPO	1. Laporan Pelatihan Calon Pengajar atau Training of Trainers (ToT) Modul 3 dan 4; 2) Laporan Pelatihan Percontohan (<i>Pilot Training</i>) dengan pengawasan dari WIPO	Dit. KSE (Pak Idris & Pak Danang)
		Triwulan III	1) Koordinasi terkait sarana dan prasarana IP Academy - website IP Academy - Perpustakaan Digital; 2) Finalisasi Business Plan IP Academy	1) Dokumen hasil laporan/nota dinas korespondensi terkait koordinasi sarana prasarana IP Academy; 2) Dokumen final Business Plann IP Academy	- Dit KSE - Dit TI KI - Setditjen KI
		Triwulan IV	Sosialisasi Kurikulum KI dan Modul Penunjang Pelaksanaan Kurikulum KI	Laporan sosialisasi Kurikulum KI dan Modul Penunjang Pelaksanaan Kurikulum KI	Dit. KSE

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	Terdapat kendala dalam formulasi kinerja terkait proses penanganan dan penyelesaian aduan pelanggaran HKI yang belum selesai di tahun - tahun sebelumnya	Januari	melakukan update manual IKU Dit. Sidik terkait mekanisme perhitungan kinerja penyelesaian aduan pelanggaran HKI	Dokumen update manual IKU Dit. Sidik	Dit. Penyidikan
		Januari-Desember	Penerapan perhitungan kinerja penyelesaian aduan pelanggaran HKI sesuai dengan update pada manual IKU	Laporan bulanan kinerja sesuai dengan manual IKU yang baru	
	1. Sistem penanganan aduan pelanggaran HKI saat ini belum difasilitasi fitur fitur seperti tanda tangan digital dan juga format berita acara sebagai salah satu 2. agar pengembangan sistem aduan di DJKI terintegrasi dengan APH yang lain	Januari	Pembuatan kebutuhan pengembangan sistem aduan dan penanganan pelanggaran HKI kepada Dit. TIKAYA	Nota Dinas kebutuhan pengembangan sistem	Dit. Penyidikan
	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dit. Penyidikan memerlukan koordinasi dan interaksi dengan APH yang lain sehingga memerlukan penambahan jumlah SDM sesuai dengan kompetensi terkait penyidikan untuk melaksanakan tugas tugas tersebut	Januari	Pembuatan Nota dinas penambahan kebutuhan SDM di Dit. Sidik kepada Sekretariat DJKI	Nota dinas penambahan kebutuhan SDM di Dit. Sidik kepada Sekretariat DJKI	Dit. Penyidikan
	Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi	Januari - Februari	Januari - Februari Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta Perlu Detail Informasi : - Kategori audiens - Lokasi tempat - Pembagian anggaran	Kantor Wilayah Kemenkumham
		Maret - Agustus	Maret - Agustus Pelaksanaan kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		September	September Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Permohonan dan Penelusuran Dokumen Paten	
	Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digranted yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)	Maret - April	Maret - April Koordinasi dan Pemetaan Calon Peserta	Laporan Koordinasi Laporan Calon Peserta	Kantor Wilayah Kemenkumham
		Mei - Oktober	Mei - Oktober Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	
		November	November Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut	Laporan Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Asistensi Teknis Paten Drafting	
	Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri	Januari	B01 : - koordinasi dengan Stakeholder terkait - Membentuk Tim Inventarisasi Data Potensi Desain Industri SK Tim	B01 : - Laporan koordinasi - SK Tim	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Februari	B02 : Koordinasi DJKI dan Kanwil Kumham secara virtual, dimana DJKI akan menyampaikan petunjuk pelaksanaan inventarisasi data potensi desain industri Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	B02 : Laporan pertemuan virtual yang dilampiri dengan dokumentasi	
		Maret	B03 : Melaksanakan rapat persiapan rencana aksi inventarisasi data potensi desain industri Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	B03 : Laporan yang dilampiri notula rapat dan dokumentasi	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April-Mei	B04 – B05 : Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah masing-masing Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	B04 – B05 : Laporan kordinasi yang dilampiri dokumentasi	
		Juni-Juli	B06 – B07 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor industri kreatif Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B06 – B07 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Agustus-September	B08 – B09 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor pendidikan Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B08 – B09 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		Oktober	B10 : Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi desain industri sektor asosiasi pengusaha atau industri Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	B10 : Laporan kegiatan yang dilampiri dokumentasi	
		November	B11 : Menyampaikan hasil inventarisasi potensi desain industri ke DJKI Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	Laporan Potensi Desain Industri di wilayah	
2	Rendahnya Permohonan Paten Dalam Negeri	Januari s/d Desember	- Melaksanakan Program Patent One Stop Service Di Daerah - Malaksanakan Program Patent Examiners Go To Campus Di Daerah 33 Provinsi	Target Peningkatan Jumlah Permohonan Paten Dalam Negeri 4.800 Permohonan Terpenuhi	Direktorat Paten Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Proses pembuatan kebijakan di Kemenkumham belum didasarkan pada bukti dan analisis yang memadai	Januari-Maret	Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan kepada UKE I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Juni	Inventarisasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai kriteria Indeks Kualitas Kebijakan	Laporan Hasil Inventaris Permenkumham sesuai kriteria Indeks Kualitas Kebijakan	
		September	Pendampingan pemenuhan data dukung Indeks Kualitas Kebijakan kepada UKE I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pendampingan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		September-Desember	1. Penilaian mandiri pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Penyusunan laporan hasil penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Rekap hasil penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Laporan penilaian mandiri Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
2	Kualitas Penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH yang belum optimal	Januari-Maret	1. Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah 2. Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	1. Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum 2. Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
		April - Juni	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Juli - November	1. Monitoring pengunggahan data dukung dan validasi penilaian mandiri oleh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Validasi dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Tim Penilai Nasional 3. Penyusunan Berita Acara Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum 4. Pleno pembahasan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum 5. Penetapan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 6. Penyampaian Hasil Penetapan Penilaian IRH kepada Menteri PAN RB 7. Penyampaian hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum secara Elektronik kepada pimpinan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah	1. Laporan Hasil Monitoring Indeks Reformasi Hukum 2. Laporan hasil validasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum 3. Dokumen Berita Acara Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum 4. Laporan Pleno pembahasan hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum 6. Surat Penyampaian Hasil Penetapan Penilaian IRH kepada Menteri PAN RB 7. Surat penyampaian hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara elektronik	
		Desember	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum	
3	Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian IRH belum optimal	Januari - Februari	Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum kepada Pemerintah Daerah	Laporan Sosialisasi Indeks Reformasi Hukum	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
		Maret	Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah	
		April- Agustus	1. Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian Indeks Reformasi Hukum 2. Verifikasi faktual dan validasi data	1. Laporan Hasil Monitoring pengunggahan data dukung dan verifikasi penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah 2. Laporan Hasil verifikasi faktual dan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	validasi data dukung hasil penilaian mandiri Pemerintah Daerah	
		November-Desember	Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Laporan Evaluasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	

 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Januari 2024

**RENCANA AKSI BIDANG PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024**

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
Ditjen PAS					
1	Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan	Januari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan;	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	2) SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Penyusunan Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	3) Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak

		Februari	1) -Penyusunan Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan; - Penyusunan SK TIM terkait penyusunan SOP Litmas Online - Diklat PK dan APK Bapas	2) -Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan; - SK TIM Penyusunan SOP Litmas Online; - Laporan pelaksanaan Diklat PK dan APK.	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Sosialisasi Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	3) Laporan Sosialisasi Surat Edaran terkait mekanisme pemasaran produk pada lapas produktif melalui e-katalog	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		Maret	1) -Sosialisasi Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan; - Menyusun Kajian terkait urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia	1)- laporan Sosialisasi Surat Edaran terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan - Hasil kajian urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia. -Diklat PK dan APK Bapas	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

			-Diklat PK dan APK Bapas		
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; -Menyusun Kajian terkait urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia: -Diklat PK dan APK	1)- Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Hasil kajian urgensi pelaksanaan litmas online di Indonesia: -Laporan Diklat PK dan APK	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
	Mei	1)- Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan - Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.	
		2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama	
		3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak	
	Juni	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah pilloting;	1) -Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah pilloting;;	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan;	

			-Monitoring dan Evaluasi hasil sosialisasi kajian terkait litmas online dengan stakeholder terkait.	-Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil sosialisasi kajian terkait litmas online dengan stakeholder terkait	2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		Juli	1) - Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan;
			-Penyusunan SOP Litmas Online	-Laporan Penyusunan SOP Litmas Online	2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak

		Agustus	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Finalisasi Penyusunan SOP Litmas Online sekaligus pengesahan SOP.	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Finalisasi Penyusunan SOP Litmas Online sekaligus pengesahan SOP.	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak

			dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	
		Oktober	1) Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan: - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Restorative Pemasyarakatan; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog;	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak
		Desember	1) -Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; -Monitoring dan evaluasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; -Laporan Monitoring dan evaluasi SOP Litmas Online	1) Direktorat pembimbingan Masyarakat dan Upaya Restorative Masyarakat; 2) Sekretariat Direktorat Jenderal Masyarakat.
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama
			3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; -Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan program	3) -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; - Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan program	Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak

2	Belum tersusunnya peraturan turunan dari Undang Undang Nomor 22 tahun 2022	Januari	1. RPP: Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; 2. Rpermen: Pembentukan SK Tim Percepatan Penyusunan Rancangan Permenkumham Aturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.	1. RPP: LaporanRapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; 2. Rpermen: SK Tim Percepatan Penyusunan Rancangan Permenkumham Aturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
---	--	---------	---	---	--

		Febuari- Maret	1. RPP: Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; 2. Rpermen: Konsepsi RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	1. RPP: Laporan Rapat Panitia Antar Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; 2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	
--	--	-------------------	---	--	--

		April-Juni	1. RPP: Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; 2. Rpermen: Konsep RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak.	1. RPP: Laporan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; 2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak.	
--	--	------------	--	---	--

		Juli- September	1. RPP: Penetapan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; 2. Rpermen: Penyelarasan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	1. RPP: Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan 2. Rpermen: Laporan Penyelarasan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	
--	--	--------------------	---	--	--

		Oktober	1. RPP: Pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan 2. Rpermen: Penetapan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	PP: Draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan 2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	
--	--	---------	--	---	--

		November - Desember	1. RPP: Pengundangan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan 2. Rpermen: Penetapan RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	1. RPP: Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan 2. Rpermen: Draft RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Pengurangan Masa Pidana, Asimilasi, Cuti Mengunjungi atau dikunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Hak Lain/ RPermenkumham tentang Keamanan dan Ketertiban/ RPermenkumham Tentang Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan/ RPermenkumham Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Hak Tahanan dan Anak	
--	--	---------------------------	--	---	--

1	Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan di wilayah	Januari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pembentukan Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	2) SK Tim Pelaksana SPPT TI Wilayah Tahun 2024	
			3) Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif	3) Laporan Pemetaan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif.	
		Februari	1) - Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	1) -Laporan Pemetaan kebutuhan PK dan APK pada Lapas dan Rutan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (pilloting)	3) Laporan Penetapan terhadap Lapas yang berpotensi menjadi lapas produktif (pilloting)	
		Maret	1) -Sosialisasi terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan	1) laporan Sosialisasi terkait Penetapan wilayah pilloting serta mekanisme dan sistem kerja PK dan APK pada Lapas/ Rutan (piloting)	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di UPT Piloting;	

			produktif melalui e katalog di UPT Piloting		
		April	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Mei	1)- Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK yang mel di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait.	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi hasil kajian dan urgensi pelaksanaan Litmas online serta pelaksanaan diskusi bersama pemangku kepentingan terkait	DIVISI PEMASYARAKATAN

			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Juni	1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah pilloting;.	1) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi PK dan APK pada Lapas dan Rutan wilayah pilloting.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) Laporan Monitoring dan Evaluasi	
		Juli	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan	

			produktif melalui e katalog di wilayah;	pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Agustus	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	
		September	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) - Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan	

			produktif melalui e katalog di wilayah;	pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah ;	
		Oktober	1) Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah;	
		November	1) -Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Sosialisasi SOP Litmas Online	1) -Laporan Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan; - Laporan Sosialisasi SOP Litmas Online	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan pemasaran dan pembelian produk lapas	3) Laporan Pengendalian dan pengawasan terhadap Pelaksanaan	

			produktif melalui e katalog di wilayah;	pemasaran dan pembelian produk lapas produktif melalui e katalog di wilayah	
		Desember	1) Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan;	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi tugas dan fungsi PK dan APK di Lapas dan Rutan wilayah piloting oleh Balai Pemasyarakatan.	DIVISI PEMASYARAKATAN
			2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	2) Pelaksanaan Evaluasi Pertukaran Data SPPT TI Bulanan	
			3) -Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	3) -Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;	

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : M.HH-01.OT.01.01 TAHUN 2024
Tanggal : 11 Januari 2024

RENCANA AKSI BIDANG IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Penerbitan Paspor Biasa Elektronik belum terlaksana pada 24 Kantor Imigrasi	Januari - Maret	1. Rapat Persiapan Penambahan 24 (dua puluh empat) Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik 2. Penetapan 126 (seratus dua puluh enam) kantor imigrasi penerbit Paspor Biasa Elektronik 3. Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Penyusunan Surat hal Pengaturan Kuota Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 5. Sosialisasi Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik	1. Notula Rapat Persiapan Penambahan 24 (dua puluh empat) Kantor Imigrasi Penerbit Paspor Biasa Elektronik 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Penetapan 126 (seratus dua puluh enam) kantor imigrasi penerbit Paspor Biasa Elektronik 3. Notula Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Surat hal Pengaturan Kuota Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 5. Laporan Kegiatan Sosialisasi	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik	
		April - Juni	Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 16 (enam belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 16 (enam belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli - September	Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Bertahap di Seluruh Kantor Imigrasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peningkatan Penerbitan Paspor Biasa Elektronik	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Secara Bertahap di Seluruh Kantor Imigrasi	
2	Perlu Ditingkatkan Spesifikasi Teknis Blangko Dokumen Perjalanan RI berstandar ICAO dan perlu pembaharuan desain	Januari-Maret	1. Pembentukan SK Tim 2. Penyusunan Draft Awal Rancangan Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014	1. SK Tim 2. Draft Awal Rancangan Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
		Januari-Maret	Pembahasan dan Penetapan Rancangan Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014	Permenkumham Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM 8 Tahun 2014	
		April - Juni	1.Pembahasan dan Penetapan Rancangan Surat Keputusan Menteri tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP 2. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP	1.Surat Keputusan Menteri tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Khusus Blangko Paspor Biasa dan SPLP	
		Juli - September	Sosialisasi Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Paspor Biasa dan SPLP	Laporan Kegiatan Sosialisasi Perubahan Kedua atas Peraturan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Menteri Hukum dan HAM tentang Paspor Biasa dan SPLP	
3	Belum Adanya Penyesuaian Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) terkait Digitalisasi Permohonan Visa	Januari - Maret	1. penerbitan SK Tim penyusunan SOPAP pengajuan permohonan visa secara digital; 2. Penyusunan SOPAP pengajuan visa secara digital; 3. pengumpulan bahan studi komparasi mengenai pemberian visa bagi tenaga kerja asing. Penerbitan SOPAP pengajuan permohonan visa	1. SK Tim 2. SOPAP pengajuan visa secara digital 3. Laporan observasi mengenai komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing di berbagai negara	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
		April - Juni	1. implementasi SOPAP pengajuan visa secara digital 2. penyusunan buku panduan pengajuan permohonan visa 3. penyusunan studi komparasi mengenai pemberian visa bagi tenaga kerja asing penerbitan buku panduan pengajuan visa	1. Laporan implementasi SOPAP pengajuan visa secara digital 2. Buku panduan pengajuan visa secara digital 3. Konsep laporan studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing di berbagai negara	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Juli - September	1. penyusunan SK Tim Pendampingan Diseminasi Pemberian Visa di Perwakilan RI sesuai Wilayah Koordinasi 2. pelaksanaan kegiatan Diseminasi Pemberian Visa di Perwakilan RI sesuai Wilayah Koordinasi 3. pelaksanaan validasi data terkait studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing di berbagai negara pelaksanaan kegiatan Diseminasi Pemberian Visa di Perwakilan RI sesuai Wilayah Koordinasi	1. SK Tim 2. Laporan pelaksanaan kegiatan Diseminasi Pemberian Visa 3. Laporan validasi data terkait studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing	
		Oktober - Desember	1. Monitoring pengajuan visa secara digital 2. Pengumpulan bahan evaluasi kebijakan pengajuan visa secara digital 3. Penyusunan laporan hasil studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing Laporan hasil studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing	1. Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Implementasi pengajuan visa secara digital 2. Laporan hasil studi komparasi pemberian visa bagi tenaga kerja asing	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
4	Kurangnya pemahaman petugas imigrasi dalam melaksanakan Pemeriksaan Foreksik Keimigrasian menggunakan Peralatan Video Spectral Comparator (VSC) pada Unit Pelaksana Teknis	Januari - Maret	1. Penyusunan rencana kegiatan diseminasi forensik keimigrasian guna peningkatan SDM di bidang pemeriksaan dokumen 2. Surat Edaran ke Satker terkait pembuatan laporan forensik 3. Melaksanakan koordinasi dengan nara sumber yakni Kedutaan dan Penyedia peralatan VSC terkait kegiatan diseminasi forensik	1. Dokumen rencana kegiatan 2. Rapat persiapan kegiatan Diseminasi forensik keimigrasian 3. Dokumen Surat Edaran ke Satker	Dit. Intelkim
		April - Juni	1. Kegiatan Diseminasi Tahap I 2. Kegiatan Diseminasi Tahap II	1. Laporan kegiatan Diseminasi Forensik Keimigrasian Tahap I dan II 2. Dokumen Data personil yang telah mengikuti Diseminasi Forensik Keimigrasian Tahap I dan II	
		Juli - September	1. Kegiatan Diseminasi Tahap III 2. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi laporan hasil pemeriksaan yang dikirimkan oleh satker	1. Laporan kegiatan Diseminasi forensik keimigrasian Tahap III 2. Dokumen Data personil yang telah mengikuti Diseminasi Forensik Keimigrasian Tahap III 3. Dokumen evaluasi	
		Oktober - Desember	Menyusun rekomendasi kebijakan di bidang keimigrasian	Dokumen Rekomendasi	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
5	Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengamanan Keimigrasian sebagai salah satu fungsi keimigrasian di Unit Pelaksana Teknis (Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan tempat lainnya yang melaksanakan fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi)	Januari - Maret	1. Penyusunan format laporan pengamanan keimigrasian 2. Penyusunan Surat Permintaan Laporan Pengamanan Keimigrasian dari Direktur Intelijen Keimigrasian kepada UPT 3. Pendistribusian Surat Permintaan Laporan Pengamanan Keimigrasian dari Direktur Intelijen Keimigrasian kepada UPT	1. Format laporan pengamanan keimigrasian; 2. Surat permintaan Laporan Pengamanan Keimigrasian dari Direktur Intelijen Keimigrasian kepada UPT	Dit.Intelkim
		April - Juni	1. Internalisasi pelaksanaan pengamanan keimigrasian oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian kepada Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan keimigrasian ke UPT Keimigrasian	1. Laporan internalisasi pelaksanaan pengamanan keimigrasian oleh Direktorat Intelijen Keimigrasian kepada Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia 2. Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan keimigrasian ke UPT Keimigrasian	
		Juli - September	Penyajian laporan pengamanan keimigrasian dari seluruh UPT (kantor dan divisi)	Kompilasi laporan pengamanan keimigrasian dari seluruh UPT	
		Oktober - Desember	Penyusunan Rekomendasi pengamanan keimigrasian dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terlaksanannya fungsi Keimigrasian.	Dokumen Rekomendasi pengamanan keimigrasian dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan terhadap ancaman,	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				tantangan, hambatan dan gangguan terlaksanannya fungsi Keimigrasian.	
6	Belum adanya update profiling pegawai dalam rangka pelaporan personil keimigrasian	Januari - Maret	1. Pembentukan aplikasi pelaporan khusus personel 2. Sosialisasi aplikasi pelaporan khusus personel di Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi	1. Laporan pembentukan aplikasi pelaporan khusus personel 2. Manual Book aplikasi pelaporan khusus personel 3. SOPAP aplikasi pelaporan khusus personel 4. Laporan hasil sosialisasi terkait aplikasi pelaporan khusus personel	Dit.Intelkim
		April - Juni	1. Uji Coba Implementasi aplikasi pelaporan khusus personel pada Divisi Imigrasi dan UPT Imigrasi yang dijadikan percontohan penerapan aplikasi	1. Laporan hasil implementasi aplikasi pelaporan khusus personel oleh Divisi Imigrasi dan UPT Imigrasi	
		Juli - September	1. Implementasi aplikasi pelaporan khusus personel pada seluruh Divisi Imigrasi dan UPT Imigrasi	1. Laporan hasil implementasi aplikasi pelaporan khusus personel oleh Divisi Imigrasi dan UPT Imigrasi	
		Oktober - Desember	1. Terselenggaranya penggunaan aplikasi pelaporan khusus personel pada Divisi Imigrasi dan UPT Imigrasi 2. Evaluasi implementasi aplikasi pelaporan khusus personel	1. Laporan hasil evaluasi terkait penyelenggaraan penggunaan aplikasi pelaporan khusus personel pada Divisi Imigrasi dan UPT Imigrasi	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
7	Adanya temuan WNA yang melakukan investasi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau telah tinggal menahun di Indonesia dengan izin tinggal keimigrasian yang sudah habis berlaku	Januari-Maret	1. Terselenggaranya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka informasi mengenai investor asing dan overstay; 2. Terselenggaranya pengumpulan bahan keterangan terkait target operasi Warga Negara Asing pemegang ITAS Investor namun terdapat dugaan investasi di Indonesia fiktif dan/atau Warga Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggal yang telah ditentukan, khususnya yang menahun	1. Laporan Hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 2. Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan yang berisikan informasi, saran, dan rekomendasi	Dit. Intelkim
		April-Juni	1. Terselenggaranya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka informasi mengenai investor asing dan overstay; 2. Terselenggaranya pengumpulan bahan keterangan terkait target operasi Warga Negara Asing pemegang ITAS Investor namun terdapat dugaan investasi di Indonesia fiktif dan/atau Warga Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggal yang telah ditentukan, khususnya yang menahun	1. Laporan Hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 2. Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan yang berisikan informasi, saran, dan rekomendasi	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Juli- September	1. Terselenggaranya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka informasi mengenai investor asing dan overstay; 2. Terselenggaranya pengumpulan bahan keterangan terkait target operasi Warga Negara Asing pemegang ITAS Investor namun terdapat dugaan investasi di Indonesia fiktif dan/atau Warga Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggal yang telah ditentukan, khususnya yang menahun	1. Laporan Hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 2. Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan yang berisikan informasi, saran, dan rekomendasi	
		Oktober - Desember	1. Terselenggaranya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka informasi mengenai investor asing dan overstay; 2. Terselenggaranya pengumpulan bahan keterangan terkait target operasi Warga Negara Asing pemegang ITAS Investor namun terdapat dugaan investasi di Indonesia fiktif dan/atau Warga Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggal yang telah ditentukan, khususnya yang menahun 3. Evaluasi pelaksanaan pengumpulan bahan informasi dan keterangan dalam upaya antisipasi ATHG terhadap Warga Negara Asing pemegang	1. Laporan Hasil koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait; 2. Laporan hasil pengumpulan bahan keterangan yang berisikan informasi, saran, dan rekomendasi 3. Laporan hasil evaluasi dokumen rekomendasi dalam hasil penyelidikan dan operasi intelijen kemigrasian terkait Warga Negara Asing pemegang ITAS Investor namun terdapat dugaan investasi di Indonesia fiktif dan/atau Warga	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			ITAS Investor namun terdapat dugaan investasi di Indonesia fiktif dan/atau Warga Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggal yang telah ditentukan, khususnya yang menahun	Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari masa izin tinggal yang telah ditentukan, khususnya yang menahun	
8	Belum terdapatnya aplikasi yang mendukung kegiatan penegakan hukum keimigrasian	Januari - Februari	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian dan Grand Launching Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian dan Grand Launching Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
		Mei	Inventarisasi Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pencatatan Basis Data Subyek yang	Laporan Inventarisasi Permasalahan Terkait dengan Pelaksanaan Pencatatan Basis Data Subyek yang	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	
		Agustus	Monitoring Impelementasi Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	Laporan Monitoring Impelementasi Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	
		November	Evaluasi Hasil Impelementasi Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	Laporan Evaluasi Hasil Impelementasi Pencatatan Basis Data Subyek yang Memerlukan Perhatian (Subject Of Interest) Keimigrasian	
		Januari	Terbentuk Tim Kolaborasi	Keputusan Direktur Jenderal	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
		Februari	1 Kajian Design Thinking Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Penyidikan dan Penindakan. 2 Penyusunan Dokumen Analisis dan Proses Bisnis Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Penyidikan dan Penindakan.	Laporan	
		Maret	Penetapan SOPAP Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	SOPAP	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April	penetapan usulan Desain Pengembangan SIMKIM Terintegrasi (Mock up) pada Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	Laporan	
		Mei	Pembangunan Infrastruktur SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		Juni	Terbentuknya Desain Pengembangan Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		Juli	Pembangunan Source Code SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		Agustus	Pembangunan infrastruktur SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		September	Scenario Testing SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		Oktober	1. User Acceptance Test 2. Penetration Test 3. Stress Test	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		November	Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		Desember	Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi untuk Aplikasi Penyidikan dan Penindakan	Laporan	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
9	Terdapat Deteni yang telah lama tinggal di Rumah Detensi Imigrasi	Februari	Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan	Laporan Rapat Pelaksanaan Identifikasi Permasalahan	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
		Mei	Pelaksanaan Pengupayaan Pemulangan terhadap Deteni yang telah didetensi selama 5 tahun atau lebih	Laporan pelaksanaan pengupayaan (dapat berupa koordinasi dengan Perwakilan negaranya, penjamin atau komunikasi dengan Deteni dalam rangka pengupayaan pemulangan)	
		Agustus	Pelaksanaan Pemulangan terhadap Deteni yang telah didetensi selama 5 tahun atau lebih	Laporan Pelaksanaan Pemulangan	
		November	Evaluasi Pelaksanaan Pemulangan terhadap Deteni yang telah didetensi selama 5 tahun atau lebih	Laporan Evaluasi	
10	Peraturan keimigrasian terbaru belum memiliki Standar Operasional Prosedur sehingga berpotensi	Januari	Rapat persiapan pembentukan SOPAP Layanan Izin Tinggal Keimigrasian	1. Notulensi hasil rapat 2. SK Tim Penyusunan SOPAP	Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
		Februari	Penyusunan SOPAP Layanan Izin Tinggal Keimigrasian	Draft SOPAP	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
	terjadinya kebingungan baik oleh petugas ataupun masyarakat.	Maret	Penyampaian draft rancangan SOPAP Layanan Izin Tinggal Keimigrasian kepada Bagian P2L dan penerbitan SOPAP	1. Nodin draft rancangan SOPAP layanan Izin Tinggal Keimigrasian kepada bagian P2L 2. SOPAP Layanan Izin Tinggal Keimigrasian yang telah ditanda tangani	
		April - Mei	Sosialisasi SOPAP Layanan Izin Tinggal Keimigrasian	Laporan Sosialisasi	
		Juni - Desember	Evaluasi penerapan SOPAP Layanan Izin Tinggal Keimigrasian	Laporan hasil evaluasi penerapan SOPAP	
11	Kebijakan Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa masih belum diketahui oleh masyarakat luas, sehingga peminat masih minim	Januari - Februari	Internalisasi Kebijakan Implementasi Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa dan pelaksanaan publikasi	1. Laporan Hasil Kegiatan Internalisasi 2. Dokumentasi publikasi informasi 3. SK Tim	Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
		Maret	Sosialisasi Implementasi Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa dan Layanan Kewarganegaraan di wilayah Amerika	Laporan hasil kegiatan sosialisasi dan meningkatnya pemegang Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa	
		April - Mei	Monitoring dan Evaluasi terhadap Implementasi Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
		Juni	Sosialisasi Implementasi Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa dan Layanan Kewarganegaraan di wilayah Eropa	Laporan hasil kegiatan sosialisasi dan meningkatnya pemegang Izin	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Tinggal yang berasal dari Golden Visa	
		Juli - Agustus	Monitoring dan Evaluasi terhadap Implementasi Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
		September	Sosialisasi Implementasi Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa dan Layanan Kewarganegaraan di wilayah Asia dan Australia	Laporan hasil kegiatan sosialisasi dan meningkatnya pemegang Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa	
		Oktober - November	Monitoring dan Evaluasi terhadap Implementasi Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
		Desember	Evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan hasil implementasi Izin Tinggal Keimigrasian yang berasal dari Golden Visa	1. Laporan Evaluasi Kegiatan 2. Laporan penerapan Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa 3. Rekapitulasi data pemegang Izin Tinggal yang berasal dari Golden Visa	
12	belum optimalnya kerja sama dalam negeri dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi dan penanggulangan kejahatan transnasional	Januari-Maret	1. Mereviu perjanjian kerja sama keimigrasian; 2. Melakukan dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dan terkait; 3. Merumuskan sasaran dan prioritas kerja sama keimigrasian; 4. Merumuskan strategi kerja sama keimigrasian	1. Kajian atau telaahan tentang reviu perjanjian kerja sama keimigrasian; 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal tentang strategi kerja sama keimigrasian di dalam negeri untuk mengoptimalkan pelayanan keimigrasian, dan untuk	Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			5. Merumuskan muatan materi kerja sama keimigrasian;	menanggulangi kejahatan transnasional	
		April-Juni	1. Pembahasan draft perjanjian kerja sama keimigrasian 2. Pengesahan perjanjian kerja sama keimigrasian 3. Sosialisasi dan edukasi perjanjian kerja sama keimigrasian 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama keimigrasian	1. Draft/ Perjanjian Kerja Sama 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
		Juli-September	1. Mereviu perjanjian kerja sama keimigrasian; 2. Melakukan dialog dan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan dan terkait; 3. Merumuskan sasaran dan prioritas kerja sama keimigrasian; 4. Merumuskan strategi kerja sama keimigrasian 5. Merumuskan muatan materi kerja sama keimigrasian;	1. Draft/ Perjanjian Kerja Sama 2. Laporan hasil monitoring dan evaluasi	
		Oktober - Desember	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama keimigrasian;	1. Laporan hasil motoring dan evaluasi;	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		September	Penyusunan Scenario Testing SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Izin Tinggal;	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Penyusunan Scenario Testing; 2. Terbentuknya Scenario Testing Pengembangan SIMKIM Terintegrasi	
		Oktober	1. User Acceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Izin Tinggal; 2. Pelaksanaan Penetration dan Stressed Test SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Izin Tinggal.	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya User Acceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi. 3. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 4. Pelaksanaan Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi	
		November	Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada layanan Izin Tinggal	Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Implementasi	
		Desember	Dilakukan rapat Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi untuk layanan Izin Tinggal	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				2. Evaluasi Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	
18	Aplikasi Deteni belum mengakomodir seluruh proses bisnis dan terintegrasi dalam Platform Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Teritegrasi	Januari	1. Usulan SK tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Deteni; 2. Terbentuknya tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	1. Draft SK Direktur Jenderal Imigrasitentang pembentukan tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Deteni; 2. SK Direktur Jenderal Imigrasitentang pembentukan tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	DITSISTIK
		Februari	1. Usulan kajian Design Thinking SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni;	1. Notula rapat usulan kajian; 2. Dokumen kajian Design Thinking SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	
		Februari	2. Penyusunan Dokumen Analisis dan Proses Bisnis Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	1. Notula rapat kajian; 2. Dokumen Analisis dan Proses Bisnis Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	
		Maret	1. Usulan peraturan Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Usulan SOPAP tentang Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	1. Draft peraturan Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Draft SOPAP tentang peraturan	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi;	
		Maret	1. Penetapan Peraturan terkait Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Penetapan SOPAP peraturan Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	1. Peraturan Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. SOPAP tentang peraturan Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	
		April	Usulan Desain Pengembangan SIMKIM Terintegrasi (Mock up) pada Aplikasi Deteni.	Dokumen Usulan Desain Pengembangan SIMKIM Terintegrasi (Mock up) pada Aplikasi Deteni.	
		April	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya Desain Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	1. Laporan Tim Kolaborasi; 2. Dokumentasi Desain Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	
		Mei	1. Publikasi dan implementasi terkait peraturan Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	Laporan publikasi dan implementasi terkait peraturan Deteni yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	
		Mei	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya Infrastruktur.	1. Laporan Tim Kolaborasi; 2. Dokumentasi Infrastruktur Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Juni	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam pengembangan Sistem; 2. Terbentuknya Desain Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi Desain Arsitektur Pengembangan SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Detenil.	
		Juli	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya Source Code.	Dokumentasi Source Code Pengembangan SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Deteni.	
		Agustus	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya infrastruktur.	Dokumentasi Infrastruktur Pengembangan SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Deteni.	
		September	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Penyusunan Scenario Testing; 2. Terbentuknya Scenario Testing Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi Scenario Testing Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	
		Oktober	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya User Acceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi User Acceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	
			1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Pelaksanaan Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi Penetration dan Stressed Test. SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni.	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		November	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Deteni; 2. Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	Laporan Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	
		Desember	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Evaluasi Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	Laporan hasil Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	
19	Tingginya demand layanan paspor yang belum dapat diakomodir dengan kapasitas produksi penerbitan paspor	Januari	1. Usulan SK tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Paspor; 2. Terbentuknya tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	1. Draft SK Direktur Jenderal Imigrasi tentang pembentukan tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Paspor; 2. SK Direktur Jenderal Imigrasi tentang pembentukan tim kolaborasi implementasi SIMKIM terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	DITSISTIK
		Februari	Usulan kajian Design Thinking SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor;	1. Notula rapat usulan kajian; 2. Dokumen kajian Design Thinking SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			Penyusunan Dokumen Analisis dan Proses Bisnis Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	1. Notula rapat kajian; 2. Dokumen Analisis dan Proses Bisnis Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	
		Maret	1. Usulan peraturan Layanan Paspor yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Usulan SOPAP tentang Layanan Paspor yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	1. Draft peraturan tentang Layanan Paspor yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Draft SOPAP tentang Layanan Paspor yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	
		April	1. Usulan Desain Pengembangan SIMKIM Terintegrasi (Mock up) pada Aplikasi Paspor.	1. Dokumen Usulan Desain Pengembangan SIMKIM Terintegrasi (Mock up) pada Aplikasi Paspor.	
		April	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya Desain Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	1. Laporan Tim Kolaborasi; 2. Dokumentasi Desain Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	
		April	1. Publikasi dan implementasi terkait Peraturan terkait Layanan Paspor yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	1. Laporan publikasi dan implementasi terkait Peraturan terkait Layanan Paspor yang terhubung dengan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		Mei	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya Infrastruktur.	1. Laporan Tim Kolaborasi; 2. Dokumentasi Infrastruktur Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	
		Juni	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam pengembangan Sistem; 2. Terbentuknya Desain Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi Desain Arsitektur Pengembangan SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Paspor.	
		Juli	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya Source Code.	Dokumentasi Source Code Pengembangan SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Paspor.	
		Agustus	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya infrastruktur.	Dokumentasi Infrastruktur Pengembangan SIMKIM Terintegrasi Aplikasi Paspor.	
		September	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Penyusunan Scenario Testing; 2. Terbentuknya Scenario Testing Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi Scenario Testing Pengembangan SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	
		Oktober	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Pengembangan SIMKIM Terintegrasi; 2. Terbentuknya User Acceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi UserAcceptance Test (UAT) SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
			1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Pelaksanaan Penetration dan Stressed Test Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	Dokumentasi Penetration dan Stressed Test. SIMKIM Terintegrasi pada Aplikasi Paspor.	
		November	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi pada layanan Paspor; 2. Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	Laporan Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	
		Desember	1. Keikutsertaan Tim Kolaborasi dalam Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi; 2. Evaluasi Implementasi Pengembangan SIMKIM Terintegrasi.	Laporan hasil Evaluasi Implementasi Pengembangan Aplikasi SIMKIM Terintegrasi.	
20	Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Januari - Maret	1. Rapat Persiapan Perluasan pelayanan e-paspor 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Rapat Pembahasan Pengaturan Distribusi Blangko dan Kuota Penerbitan Paspor Biasa Elektronik pada Kantor Imigrasi 4. Sosialisasi Perluasan pelayanan e-paspor	1. Notula Rapat Persiapan 2. Penetapan Kantor Imigrasi penerbit e-Paspor 3. Notula Rapat Pembahasan 4. Laporan sosialisasi	Wilayah

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
		April - Juni	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli - September	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Pemantauan Perluasan pelayanan e-paspor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
21	Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi	Januari-Maret	1. Melakukan pemetaan analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	1. Peta analisa kebutuhan pelayanan paspor dalam di unit satuan kerja 2. Penambahan kuota merujuk pada hasil pemetaan analisa kebutuhan	Wilayah
		April-Juni	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan TugasTeknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah	

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
				Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Juli- September	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
		Oktober - Desember	Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Laporan Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pengawasan Pelaksanaan Tugas Teknis Peningkatan Penerbitan Paspor pada Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	
22	Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara	Januari- Desember	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (<i>awareness</i>) melalui pengayaan (<i>enrichment</i>) fungsi desa binaan imigrasi 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	1. Laporan Kegiatan 2. Laporan Koordinasi	Wilayah

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
23	Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Januari-Maret	1. Pengetatan target sasaran 2. Pengetatan pengendalian petugas	1. Laporan Pengetatan sasaran 2. Laporan Pengendalian Petugas	Wilayah
		April-Juni	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait	Laporan Koordinasi	
		Juli-September	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	Laporan Peningkatan sarana dan prasarana pendukung	
		Oktober - Desember	Evaluasi pelaksanaan tugas	Laporan Evaluasi	



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY